

Judul : Puan Ajak DPR Jaga Kepercayaan Rakyat
Tanggal : Minggu, 06 Oktober 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Puan Ajak DPR Jaga Kepercayaan Rakyat

JAKARTA—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani optimistis DPR periode 2019-2024 akan menjelma menjadi lembaga legislatif yang modern serta siap menghadapi tantangan kemajuan zaman ke depan.

Untuk bisa mewujudkan itu, tandasnya, maka DPR harus senantiasa menjaga amanah rakyat. "DPR yang menjaga kepercayaan rakyat, tidak antikritik, dan bisa menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk rakyat Indonesia," kata Puan di Jakarta kemarin.

Sebagai ketua DPR, dia mengaku sudah ada dan akan ada beberapa hal yang akan terus diingatkan, baik kepada seluruh pimpinan DPR maupun seluruh anggotanya, sebagaimana dia sampaikan dalam pidato perdananya

sebagai ketua DPR. "Pertama, kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegal. Jadi harus dijalankan dengan semangat gotongroyong," ujarnya.

Kedua, dirinya mengajak seluruh anggota DPR agar tidak terpecah belah dan kontraproduktif, kendati perkembangan di DPR tentu akan sangat dinamis. "Di DPR banyak warna, tetapi kita semua tetap Merah Putih," tandasnya.

Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Pelantikannya dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali di Gedung dalam rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, pada Selasa (1/10) malam. Puan mencetak sejarah baru sebagai ketua DPR perempuan di Tanah Air.



DOK SINDO

PUAN MAHARANI

Ketua DPR

Sementara Wakil Ketua DPR diisi oleh Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Senada diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad. Menurut dia, prioritas utama

DPR adalah mengembalikan kepercayaan rakyat. "Suara-suara minor dari publik terhadap anggota DPR terkadang nyaring terdengar karena rendahnya kinerja DPR periode lalu dan banyaknya anggota DPR yang tersangkut masalah hukum," ungkapnya.

Namun, lanjut Kamrussamad, kepercayaan rakyat tetap harus dikembalikan kepada DPR dengan cara sungguh-sungguh menjalankan tugas pengawasan jalannya pemerintahan, menuntaskan RUU yang sudah masuk prolegnas, juga menghindari DPR memproduksi undang-undang yang justru tidak berpihak kepada rakyat. "Kemudian, berkomitmen menjaga integritas. Itulah acara kembalikan kepercayaan rakyat," tandasnya.

● okezone